



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAGONG KUSMINANDAR**
2. Jabatan : **KEPALA BALAI**
3. NHK : **144897**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 725.000.000

1. Tanah Seluas 70 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 25.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 101 m2/60 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 79.000.003

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 1
2. MOTOR, KAWASAKI SEPEDA MOTOR Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 2
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
6. MOTOR, HONDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 8.000.001

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 467.900.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	110.350.000
Sub Total	Rp.	1.390.250.004
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.390.250.004

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.